## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku

Adami Chazawi. (2001). Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ali, Mahrus. (2011). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
Anwar. (1989). Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku III). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Atmasasmita, Romli. (1996). Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme. Jakarta: Bina Cipta.

Budiman, Maman. (2021). Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Malang: Setara Press.

Hamzah, Audi. (1983). Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP. Jilid I. PT. Sarana Bakti.

Lamintang. (2013). Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.

Luhut M P Pangaribuan. (2002). Hukum Acara Pidana. Jakarta: Djambatan.
Mamuji, Sri. (2005). Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, cet.Pertama. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia.

Marpaung, Laden. (2011). Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki. Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: 1Kencana Prenada Media Group.

Mulyadi, Lis. (2007). Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan. PT. Citra Aditya Bakti.

Nasution, Karim. (1975). Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana. Jakarta.
P.A.F. Lamintang. (1997). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Prakoso, Djoko. (1983). Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Didalam Poseses Pidana. Yogyakarta.
Prasetyo, Ridwan Eko. (2015). Hukum Acara Pidana. Bandung: Pustaka Setia.
Prasetyo, Teguh. (2011). Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Prodjodikoro, Wirjono. (2003). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung. Refika Aditama.Prodjodikoro, Wirjono. (2003). Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: Refika Adityama.

R Suparmono. (2003). Praperadilan Dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP. Bandung: Mandar Maju.
R. Atang. (1981). Hukum Acara Pidana. Bandung: Tarsito.
R. Tresna. (2000). Komentar HIR. Jakarta: Pradnya Paramita.

Rusli, M. (2011). Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
Saefudien. (2001). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sahetapy. (1982). Parados Kriminologi. Jakarta: Rajawali.
Sajipto, Raharjo. (2009). Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Saleh, Roeslan. (1982). Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia

Satjipto, Rahardjo. (2006). Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Kompas.
Soekanto, S. (1985). Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, S., \& Sri. (2009). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soemitro, R. H. (1985). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Syahrani, Ridwan. (1983). Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana.

Bandung: Alumni.
Peter Mahmud Marzuki.(2005). Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
R. Atang. (1981). Hukum Acara Pidana. Bandung: Tarsito.

Ridwan Syahrani. (1983). Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana. Bandung: Alumni

Satjipto Rahardjo. (2009). Membangun Polisi Sipil : Perspektif Hukum, sosial, dan Kemasyarakatan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Soerjono, S., \& Sri,M. (2009). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sri Mamuji. (2005). Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, cet. Pertama. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Wirjono Prodjodikoro. (2003). Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: Refika Adityama.

## 2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Sumber Lain
A. Zainal Abidin Farid. (1980). Coretau Ringkas Tentang Pengalaman Sebagai Jaksa Muda dan Issue Praktek Pelaksanaan Hu.ukm Pidana Dewasa Ini, Hukum dan Keadilan, XIV Juli-Agustus

Ahmad Sofian Binus University Business Law. Terbitnya Sp3 (Surat Perintah

Penghentian Penyidikan) Dan Praperadilan. Diakses dari https://business-law.binus.ac.id/2021/06/21/terbitnya-sp3-surat-perintah-penghentian-penyidikan-dan-praperadilan/ pada tanggal 05 Januari 2022 pukul 15.08

Andreas Derryadi. "Kewenangan Praperadilan Terhadap Permohonan Penghentian Penyidikan yang Diajukan Oleh Tersangka, 2015.

Emerson Yuntho, Mencermati Pemberian SP 3 Kasus Korupsi, diakses dari http://www.hukumonline.com/detail pada tanggal 5 Januari 2022 pukul 15.07

Margaret Tarkinton. (2015). "Lost in Compromise : Free Speech-Criminal Justice and Attorney Pretrial Publicity".

